

**REKRUTMEN POLITIK CALEG PKS DAN CALEG GOLKAR
DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009
DI KOTA YOGYAKARTA**



Oleh:

Muhammad Azani, S.Th.I
NIM. 06.234.383.

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2010**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan ini disampaikan, bahwa setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi atas naskah tesis yang berjudul:

REKRUTMEN POLITIK CALEG PKS DAN CALEG GOLKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Azani, S.Th.I
NIM : 06.234.383.
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan guna memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 01 April 2010

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP : 19490521 198303 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Muhammad Azani, S.Th.I
NIM : 06.234.383.
Program : Magister
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis saya secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 01 April 2010

Yang menyatakan


Muhammad Azani, S.Th.I
NIM. 06.234.383.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : REKRUTMEN POLITIK CALEG PKS DAN CALEG
GOLKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009
DI KOTA YOGYAKARTA

Nama : Muhammad Azani, S.Th.I.

NIM : 06.234.383

Prodi : Hukum Islam

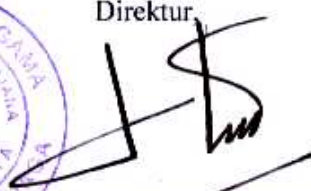
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

Tanggal Ujian : 26 April 2010

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 12 Mei 2010

Direktur,






Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain
NIP. 19490914 197703 1 001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : REKRUTMEN POLITIK CALEG PKS DAN CALEG
GOLKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009
DI KOTA YOGYAKARTA

Nama : Muhammad Azani, S.Th.I.
NIM : 06.234.383
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	: Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.	()
Sekretaris	: Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	()
Pembimbing/Penguji	: Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.	()
Penguji	: Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain	()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 26 April 2010

Waktu : 12.00 – 13.00 WIB
Hasil/Nilai : A- / 3,50
Predikat : ~~Memuaskan~~/Sangat Memuaskan/~~Cum laude~~*

ABSTRAK

Studi ini mengkaji proses pencalonan anggota legislatif lokal (DPRD kota) yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar dalam pemilu legislatif 2009. Problem penting dalam penelitian ini berkaitan dengan proses kemunculan para kandidat atau caleg, tahapan yang harus dilalui para caleg, kriteria dan acuan yang digunakan partai politik dalam menjaring caleg, aktor-aktor dibalik penentuan nomor urut, orientasi partai dalam menentukan daftar caleg, sejauhmana keterlibatan rakyat dan kaum perempuan. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPD Golkar kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009 dan bagaimana kecenderungan dan pola di balik pencalonan legislatif lokal yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah comparative analysis atau analisis perbandingan, yakni teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis fenomena perbandingan tentang rekrutmen caleg kedua partai.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kedua partai sama-sama menerapkan usulan dari bawah atau *bottom-up*. DPD PKS membangun pelembagaan moderat (*pola pelembagaan pencalonan sedang*) dengan menyerahkan proses administrasi caleg pada Tim PANJATIDA. Daftar caleg dibawa dalam rapat pleno PUI dan semua kader tingkat Madya ke atas dalam rapat pleno PUI DPD PKS memiliki hak suara yang sama untuk memilih caleg dalam daftar caleg resmi DPD PKS. Sedangkan DPD Golkar cenderung menganut pola pelembagaan pencalonan caleg secara optimal (*pelembagaan optimal*). Tim 7 memiliki wewenang penuh dalam menentukan skor caleg, penempatan nomor urut, memutuskan dan mengesahkan jumlah caleg lolos dan tidak lolos seleksi Tim 7.

Terdapat kecenderungan yang sama di balik proses pencalonan terutama dalam konteks mekanisme pencalonan dan penetapan caleg. *Pertama*, dari segi prosedur dan mekanisme pencalonan, elite kedua partai di kota Yogyakarta ternyata sangat diuntungkan dengan adanya pedoman penyusunan caleg. *Kedua*, proses pencalonan caleg kedua partai didominasi oleh pemenuhan aspek-aspek teknis-administratif ketimbang kualifikasi dan kualitas para calon seperti pengabdian, komitmen dan loyalitas terhadap partai. *Ketiga*, proses pencalonan caleg berlangsung tertutup di antara lingkungan internal DPD PKS dan DPD Golkar dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat. Sebaliknya, terdapat kecenderungan yang berbeda dibalik proses pencalonan yakni, *pertama*, perbedaan wewenang yang dimiliki Tim penjaringan kedua partai. Kewenangan Tim PANJATIDA dikontrol Tim DPD PKS dan Tim Dewan Syuro, sedangkan kewenangan Tim 7 bersifat mutlak. *Kedua*, perbedaan dalam penentuan skoring caleg. Skor caleg DPD PKS tidak ditentukan berdasarkan jabatan di partai, namun kualitas kerja caleg di tingkat apapun (DPD sampai DPRa). Sedangkan skor caleg DPD Golkar ditentukan berdasarkan jabatan di partai. *Ketiga*, penetapan daftar caleg DPD PKS berikut nomor urutnya dilakukan dalam rapat PUI antara Tim PANJATIDA, DPD PKS dan Dewan Syura serta semua kader PKS (*inklusif*), sedangkan penetapan daftar caleg DPD Golkar dilakukan Tim 7 (*eksklusif*).

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis ini, bersumber dari pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	ghain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a-i
وَ	Fathah dan Wau	au	a-u

Contoh:

كيف ---- *kaifa*

حول ---- *haulā*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fatḥah dan alif	ā	A dengan garis di atas
آِ	Fatḥah dan ya	ā	A dengan garis di atas
آِي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
آُ	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قال ---- *qāla* قيل ---- *qīla*
 رمي ---- *ramā* يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta *marbuṭah*

- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi *Ta' Marbuṭah* mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbuṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbuṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال ---- *rauḍah al-atfāl*
 المدينة المنورة ---- *al-Madīnah al-Munawwarah*
 طلحة ----- *Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل ----- *nazzala*
 البر ----- *al-birru*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. أما بعد:

Dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tesis penulis yang berjudul **“Rekrutmen Politik Caleg PKS dan Caleg Golkar Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta”**, telah selesai. Terlepas dari hasil yang diperoleh, tesis ini dibuat dengan kemampuan dan usaha yang maksimal dari penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan selesai dan terwujud dalam bentuk dan isi sebagaimana tersaji, jika tidak ada bantuan dan jasa dari berbagai pihak bagi usaha penyusunannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada mereka. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA selaku pembimbing, atas segala arahan, bimbingan, saran, kesabaran, perhatian dan waktu yang beliau berikan dan luangkan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga akhir penyusunan tesis ini. Masukan-masukan dari beliau yang amat berharga mempunyai andil besar dalam penyempurnaannya. Ucapan terima kasih juga harus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga. Di sela-sela kesibukan beliau, masih sudi meluangkan waktu untuk sekedar beramah-tamah lewat meja bundar kelas pasca.
2. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. H Abd. Salam Arief, M.A. dan Bapak Moehamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku penasehat akademik sekaligus Ketua dan Sekretaris

Jurusan Hukum Islam, Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih banyak atas bimbingan dan toleransinya selama ini.

4. Bapak dan ibu dosen dan seluruh staf administrasi (khususnya Sumarni) Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kawan-kawan angkatan 2006-2007 Studi Politik Dan Pemerintahan Dalam Islam, Mukhtarom, Samad Humarama, Ridwan, Rahmatullah, Dedeng Alamsyah, Ludyansyah, Zuhri Humaidi, Mukhlis Mubarak Dalimunthe, Najamuddin, Hilyatul Auliya, dan Eka Martini penulis ucapkan terimakasih dan selamat berbahagia karena kekariban, canda, serta kehangatan persahabatan kalian melengkapi format studi ku di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Terima kasih pula kepada pengurus di DPD II PKS dan DPD II partai Golkar kota Yogyakarta, khususnya Muhammad Rosyidi, ST, MT, Ketua DPD II PKS kota, Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi, ketua Tim PANJATIDA PKS kota dan Muhammad Yuniardi, SP, ketua Bidang Pembinaan Kader. Di DPD II partai Golkar, secara khusus penulis ucapkan terima kasih pada bapak Drs. Suhartono, ST, Ketua DPD II partai Golkar kota sekaligus ketua Tim 7 rekrutmen caleg dan sekarang menjabat sekretaris DPD I Golkar provinsi DIY, Augustus, SH, S. IP, sekretaris DPD II Golkar dan Bambang Seno Baskoro, ST, wakil ketua Farksi Golkar di DPRD yang juga tergabung dalam tim 7 rekrutmen caleg Golkar di kota Yogyakarta. Mereka bersedia meluangkan waktu pada penulis di sela-sela kesibukan sebagai anggota Dewan kota. Demikian juga terima kasih kepada Nashrullah, SH, S. Ag, MCL, ketua KPU kota dan Aan Kurniasih, SH, anggota KPU kota dan staff di sekretariat KPU kota yang telah memberikan data-data berharga terkait studi penulis. Selain itu, bantuan staff sekretariat DPRD kota yang memperlancar penulis dalam wawancara dan penelusuran data.

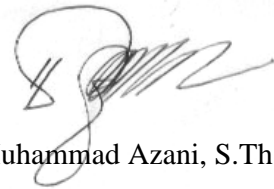
Ayahanda tercinta, dengan tetesan darah dan keringat tanpa mengenal lelah berupaya siang dan malam berdoa dan berusaha demi kesuksesan anaknya. Ibunda tercinta, dengan sentuhan kasih dan sayangnya mendampingi ayahanda mencari nafkah serta mendidik kami dengan penuh kesabaran. Demikian juga, doa

yang diberikan keduanya pada penulis ikut membantu dalam memberikan motivasi penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metodologi, substansi maupun analisis data, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala masukan, saran ataupun studi lebih lanjut untuk kesempurnaannya. Sesungguhnya kesaempurnaan hanyalah milik Allah Swt pencipta alam semesta.

Yogyakarta, 01 April 2010

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Azani', written over a faint circular stamp.

Muhammad Azani, S.Th.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II. PETA KEKUATAN POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA YOGYAKARTA	30
A. Partai Islam Versus Nasionalis Dalam Pemilu 2004 dan 2009	30
B. Peta Kekuatan Fraksi Di DPRD Kota Hasil Pemilu Legislatif 2009...	36
C. Rekrutmen Pengurus DPD PKS dan DPD Golkar.....	44
BAB III. REKRUTMEN CALEG DPD PKS DAN CALEG DPD GOLKAR DALAM PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA YOGYAKARTA	57
A. Mekanisme Rekrutmen Caleg DPD PKS kota Yogyakarta	57
A.1. Proses Pencalonan Caleg DPD PKS.....	57

A.2. Proses Penetapan dan Profil Caleg DPD PKS	68
B. Mekanisme Rekrutmen Caleg DPD Golkar kota Yogyakarta.....	78
B.1. Proses Pencalonan Caleg DPD Golkar	78
B.2. Proses Penetapan Dan Profil Caleg DPD Golkar	87
C. Perbandingan Caleg DPD PKS dan Caleg DPD Golkar	94
D. Indikator Rekrutmen Caleg DPD PKS dan DPD Golkar	104
D.1. Tingkat Loyalitas	104
D.2. Skill dan Tingkat Personalitas	107
D.3. Dana dan Basis Massa.....	108

BAB IV. KECENDERUNGAN DAN POLA DIBALIK PENCALONAN

CALEG DPD PKS DAN CALEG DPD GOLKAR.....

A. Kecenderungan Pencalonan Caleg DPD PKS dan DPD Golkar	110
B. Pola <i>Pelembagaan Moderat Dan Optimal: Analisis Pola</i> Pencalonan dan Penetapan Caleg.....	116
C. Warisan Pembentuk Oligarkis: Prilaku Elit Versus Kader Partai Di DPD PKS dan DPD Golkar	131
D. Pembaruan Rekrutmen Caleg Pemilu legislatif 2014	135

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	140
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perolehan kursi DPRD kota.....	37
Tabel 2. 2 Caleg perempuan di DPRD.....	42
Tabel 2. 3 Pengurus DPD PKS.....	48
Tabel 2. 4 Pengurus DPD Golkar	50
Tabel 3. 1 Pola nomor urut caleg DPD PKS dapil 1	70
Tabel 3. 2 Skoring caleg DPD Golkar	82
Tabel 3. 3 Pola nomor urut caleg DPD Golkar dapil 1	88
Tabel 3. 4 Pola nomor urut DPD Golkar dapil 2.....	89
Tabel 3. 5 Perbandingan Asal caleg (Partai-Non partai)	95
Tabel 3. 6 Perbandingan Caleg lama dan caleg baru.....	96
Tabel 3. 7 Perbandingan Caleg laki-laki dan perempuan	97
Tabel 3. 8 Perbandingan usia caleg	98
Tabel 3. 9 Perbandingan Profesi caleg.....	100
Tabel 3. 10 Perbandingan Pendidikan caleg	102
Tabel 3. 11 Perbandingan Agama caleg.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua aktor utama masyarakat politik, yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Peran partai politik itu diletakkan dalam arena pemilihan umum, yang di dalamnya terjadi kompetisi antar partai dan partisipasi politik masyarakat sipil untuk memberikan mandat pada partai atau kandidat pejabat politik yang dipercayainya.¹ Mengikuti logika demokrasi, para pejabat politik (legislatif dan eksekutif) - yang telah memperoleh mandat melalui partisipasi politik masyarakat dalam pemilu - harus mengelola sumberdaya ekonomi-politik (kekuasaan dan kekayaan) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsivitas untuk masyarakat.

Di sisi lain partai politik dan pemilihan umum merupakan tempat yang paling tepat untuk proses rekrutmen politik, dalam rangka mengorganisir kekuasaan secara demokratis. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil.² Selama ini ada argumen bahwa

¹ Miriam Budiharjo, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 163-164 dan Jimly Assididqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 59

² Selain rekrutmen politik, fungsi penting dari partai politik adalah mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih (*voting pattern*), dan sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics In*

rekrutmen politik merupakan sebuah proses awal yang akan sangat menentukan kinerja parlemen (legislatif). Jika sekarang kapasitas dan legitimasi DPRD sangat lemah, salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen yang buruk. Karena Undang-undang pemilihan umum sekarang telah menerapkan sistem proporsional terbuka, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses rekrutmen parlemen. Tetapi undang-undang itu akan menjadi barang yang mati kalau tidak aksi konkret yang lebih maju dalam proses rekrutmen.

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi. *Pertama*, sistem pemilihan umum proporsional telah mengabadikan dominasi oligarki dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki “nomor topi” dan siapa yang sengsara menduduki “nomor sepatu”. Dalam pemilu legislatif 2009, sebetulnya nomor urut topi tidak menentukan caleg dapat terpilih menjadi anggota legislatif, namun telah diprediksi sejak awal sulit bagi caleg di partai manapun memperoleh suara signifikan dalam BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) di suatu daerah pemilihan. Jika tidak memenuhi BPP, caleg dapat menjadi anggota legislatif dengan mengikuti nomor urut.³ *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya “mewakili” daerah administratif (bukan konstituen yang sebenarnya), sehingga pembelajaran untuk

Western Europe: Britania, France, Italy and Germany, third edition, (Oxford University Press, 1998), hlm. 59

³ Mohammad Najib, *Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Pemilu Legislatif*, (Yogyakarta: UGM, 2008), hlm. 7

membangun akuntabilitas dan responsivitas menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya, yang kelak akan membawa dan mempertanggungjawabkan mandat. Publik sering bilang bahwa masyarakat hanya bisa “membeli kucing dalam karung”.⁴ *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (linkage) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka, bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan. Berbagai organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai *underbow*, sebuah mesin politik yang memobilisasi massa, bukan sebagai basis perjuangan politik partai. *Keempat*, proses pemilihan umum dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks “massa mengambang” yang kurang terdidik dan kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat Indonesia tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi (*mobilized voters*).⁵

Gejala-gejala di atas merupakan problem yang rumit dalam rekrutmen politik menuju tatanan politik demokratis di parlemen (DPR dan DPRD), terutama terjadi dalam rekrutmen caleg di tingkat lokal. Gejala-gejala ini menarik minat penulis melakukan penelitian yang menfokuskan pada rekrutmen caleg partai di DPRD kota Yogyakarta periode 2009-2014. Pilihan atas DPRD kota dilakukan secara sengaja dengan asumsi bahwa jarak antara konstituen dengan para caleg

⁴ Bertentangan dengan Undang-undang pemilu nomor 10/2008 pasal 51 tentang sistem terbuka dalam rekrutmen caleg partai.

⁵ Josef Christofel Nalanan, *Pendidikan Politik, Parpol dan Pemilu Legislatif 2009*, (Jakarta: Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat, 2008), hlm. 4

lebih dekat sehingga rakyat dapat mengenal langsung para calegnya dibandingkan DPRD Provinsi atau DPR RI.

Dalam 10 tahun terakhir, banyak bermunculan partai-partai baru yang menggunakan slogan membawa visi dan misi baru. Munculnya partai-partai ini berdampak pada banyaknya kemunculan elit lokal yang selama ini tidak terdengar kiprah dan sepak terjang di politik atau tidak mendapat posisi di partai lama. Munculnya elit-elit politik baru dalam konteks lokal, merupakan fenomena menarik dalam perjalanan parlemen lokal di Indonesia dan khususnya di kota Yogyakarta. Partai berpengaruh seperti Golkar dan PDI-P masih mengandalkan kandidat senior dalam parlemen lokal, partai-partai baru berhaluan nasionalis seperti Hanura, Gerindra dan PKS mengandalkan kandidat junior dalam bertarung di pemilu legislatif lokal.

Setidaknya terdapat ribuan elit-elit politik di tingkat kota Yogyakarta yang muncul selama pemilu legislatif 2009 dari partai-partai baru. Elit-elit tersebut direkrut partai-partai baru untuk bersaing memperebutkan kursi di DPRD kota. Munculnya elit-elit baru memberikan ancaman dan rasa tidak aman serta dapat menggeser posisi elit-elit lama dan senior yang telah lama duduk di DPRD kota. Elit-elit politik di tingkat kota Yogyakarta tidak dapat santai menikmati kemenangan mudah dengan menjamurnya caleg-caleg baru. Euforia kekuasaan seolah terpecah ke berbagai arah tanpa ada kendali yang dapat dilakukan. Munculnya elit-elit baru merupakan kemenangan demokrasi di kota Yogyakarta, namun membawa masalah baru terkait dengan kualitas elit lokal yang bertarung, kualifikasi, keahlian dan tata kelola politik. Persoalannya adalah apakah elit-elit

lokal yang muncul dalam pemilu legislatif di kota Yogyakarta sebagai bentuk pemaksaan demokrasi atas dalih keterbukaan dan kebebasan warga negara. Namun yang menjadi problem krusial adalah jaminan kualitas atas rekrutmen parta-partai terhadap elit-elit lokal yang muncul di kota Yogyakarta. Tidak ada jaminan semua elit lokal dalam daftar caleg resmi partai berkualitas. Dalam konteks ini, rekrutmen politik atas munculnya elit-elit lokal sangat menentukan arah demokrasi di kota Yogyakarta dalam lima tahun ke depan.

Studi ini mengkaji proses pencalonan anggota legislatif lokal (DPRD kota) yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar dalam pemilu legislatif 2009. Sejumlah problem penting dalam penelitian ini berkaitan dengan proses kemunculan para kandidat atau caleg, tahapan yang harus dilalui para caleg, kriteria dan acuan yang digunakan partai politik dalam menjaring caleg, aktor-aktor dibalik penentuan nomor urut, orientasi partai dalam menentukan daftar caleg, sejauhmana keterlibatan rakyat dalam proses pencalonan caleg dan apakah keterwakilan unsur-unsur masyarakat terlibat di dalamnya termasuk kaum perempuan. Sejumlah problem tersebut sejauh ini tidak pernah dijelaskan secara memadai karena terbatasnya studi tentang kemunculan elit politik di lembaga legislatif di Indonesia terutama di tingkat lokal.

Studi ini didasarkan pada penelitian lapangan yang difokuskan pada rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPD Golkar dalam pemilu 2009. Terdapat dua alasan tentang pemilihan dua partai ini menjadi agenda penelitian. *Pertama*, PKS merupakan representasi partai Islam dengan struktur partai yang kuat dan dukungan yang solid, bahkan militan jika di bandingkan dengan representasi

partai Islam manapun termasuk PPP dan PBB. Sedangkan partai Golkar merupakan representasi partai nasionalis yang memiliki infrastruktur partai yang kuat, kepengurusan yang solid dari pusat sampai daerah, kader-kader berkualitas dan berpengalaman dalam hiruk pikuk politik. *Kedua*, DPD PKS sebagai pemenang terbanyak partai Islam atas perolehan kursi di DPRD kota Yogyakarta dengan 5 kursi bila dibandingkan partai Islam lain. Sedangkan Partai Golkar juga mendudukkan kadernya 5 kursi di DPRD kota Yogyakarta dari kelompok partai nasionalis. Perolehan kursi Golkar di DPRD kota sebetulnya kalah dengan PDI-P (11 kursi), namun setelah penulis bandingkan dalam pra penelitian, mekanisme rekrutmen Golkar lebih transparan terkait dengan komposisi caleg perempuan, pendidikan tinggi caleg dan usia caleg dibanding PDI-P. *Ketiga*, PKS merupakan partai era reformasi yang terus mengalami perkembangan yang signifikan, memiliki jiwa bertarung yang luar biasa dan memiliki konsistensi yang tinggi dalam menegakkan dakwah dan politik dan didukung sumber daya yang unggul dan pantang menyerah. Sedangkan partai Golkar merupakan partai petarung lama dalam kancah politik Indonesia sejak orde baru dan tetap eksis hingga kini. Jadi studi ini mempelajari pertarungan kader-kader partai Islam dan baru melawan kader-kader partai lama, berpengalaman dan selalu memegang kendali pemerintahan.

Dalam menentukan pilihan atas dua partai ini, penulis membandingkan dengan partai lain pada ideologi yang sama yakni antara ideologi agama dan nasionalis dan menggunakan acuan komposisi caleg laki-laki dan perempuan, komposisi pendidikan dan komposisi usia. Pilihan atas DPD PKS, penulis

membandingkan dengan partai-partai yang berideologi Islam yaitu PPP dan PBB. Dari ketiga komposisi yang penulis bandingkan, ternyata DPD PKS unggul dalam semua komposisi. PPP dan PBB hanya sedikit merekrut caleg perempuan karena berdasarkan ideologi Islam tentang perempuan tidak boleh menjadi pemimpin politik. Tingkat pendidikan caleg PPP dan PBB sebetulnya banyak yang telah berpendidikan tinggi, namun jauh dibawah DPD PKS. Bahkan PPP juga banyak merekrut caleg berusia senior atau tua. Inilah alasan penulis menggunakan sampel DPD PKS untuk penelitian ini yang dibandingkan dengan DPD Golkar.

Pilihan atas partai Golkar dibandingkan dengan PDI-P sama-sama sebagai partai senior di kota Yogyakarta. Dalam studi perbandingan, ternyata tiga komposisi di atas lebih unggul digunakan DPD Golkar. DPD PDI-P lebih sedikit memberikan porsi caleg perempuan, komposisi pendidikan SMA lebih banyak dan komposisi usia senior DPD PDI-P merekrut lebih banyak. Inilah alasan penulis menggunakan sampel DPD Golkar untuk penelitian ini yang dibandingkan dengan DPD PKS.

Studi perbandingan terhadap mekanisme rekrutmen caleg PKS dan caleg Golkar, sesungguhnya studi tentang perbandingan pertarungan elit-elit lokal kader PKS dan kader Golkar dalam menentukan eksistensi di kancah politik lokal dengan dalih pengabdian pada negara dan partai. Kader kedua partai selalu mengatakan bahwa kandidat caleg adalah penugasan partai yang membutuhkan tanggung jawab dan totalitas. Namun totalitas yang dimaksud adalah totalitas pada partai, kepentingan, kelompok dan golongan. Selain itu, studi perbandingan ini sebetulnya studi perbandingan terhadap perilaku elit-elit DPD PKS dan DPD

Golkar dalam menentukan nasib komposisi kader-kader kedua partai yang terbungkus secara resmi dalam tim penjangkaran caleg (Tim PANJATIDA dan Tim 7). Di sini terjadi pertarungan antar elit partai untuk membaca selera pasar pemilih, komposisi DPD PKS atau komposisi DPD Golkar yang paling laku di pasaran dalam menjual caleg di tiap dapil.

Studi ini sebagai analisis terhadap problem mekanisme rekrutmen caleg kedua partai di kota Yogyakarta. Studi perbandingan atas dua partai semakin menarik karena mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS menggunakan kualifikasi dan logika agama, sedangkan mekanisme rekrutmen caleg DPD Golkar menggunakan kualifikasi dan logika di luar konteks agama. Namun studi ini tidak akan mempertentangkan teori rekrutmen dengan kualifikasi agama atau non agama atau mencari sisi ideal dari salah satu kedua partai. Semua analisis dalam studi betul-betul merupakan analisis data ilmiah yang ditopang dengan berbagai kerangka teori berdasarkan data lapangan.

B. Rumusan Masalah

Dalam memetakan persoalan rekrutmen yang dilakukan kedua partai di kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009, penelitian ini memfokuskan pada dua persoalan:

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dan caleg DPD Golkar Kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009 ?
2. Bagaimana kecenderungan dan pola di balik pencalonan legislatif lokal yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkap problem-problem dalam rekrutmen caleg partai politik yang tertuang dalam rumusan masalah:

1. Mengatahui mekanisme rekrutmen caleg PKS dan caleg Golkar Kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009
2. Mengatahui kecenderungan di balik pencalonan legislatif lokal yang dilakukan DPD PKS dan DPD Golkar

Manfaat penelitian ini adalah upaya yang sungguh-sungguh dalam mencari mekanisme rekrutmen caleg PKS dan caleg Golkar dalam hal:

1. Bahan evaluasi kebijakan politik dalam organisasi partai khususnya rekrutmen politik, agar lebih meningkatkan perannya sebagai wahana penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan di kota Yogyakarta.
2. Bahan referensi dan rekomendasi untuk partai politik dalam upaya memperbaiki sistem rekrutmen caleg politik yang berkualitas pada pemilu lima tahun ke depan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam memperkuat basis penelitian tentang rekrutmen politik, penulis telah melakukan sejumlah telaah pustaka penelitian sebelumnya untuk memberikan perbedaan perspektif terhadap penelitian ini. Penelitian tentang rekrutmen politik telah dilakukan dengan segmen yang berbeda-beda. Penulis melacak penelitian terdahulu berdasarkan tenggat penelitian antara tahun 2001-

2008, karena periode inilah studi tentang rekrutmen politik marak dilakukan di Indonesia dalam konteks lokal.

Sebelum melacak penelitian tentang rekrutmen caleg yang dilakukan PKS da Golkar secara khusus, penulis juga melacak hasil-hasil penelitian tentang kedua partai secara umum di Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga. *Pertama*, penelitian tentang Peran Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik oleh M. Zainal Anwar. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, dilihat dari kumpulan aktor, PKS merupakan kumpulan aktivis yang terdidik dengan baik dan memiliki pengalaman berorganisasi yang cukup. *Kedua*, tidak hanya mengacu pada syariah, preferensi kebijakan publik yang diperjuangkan PKS juga mengacu pada nilai kebaikan bersama atau kemaslahatan ummat. Dalam menentukan kebaikan tersebut, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan; 1) syariat Islam, 2) hukum positif, 3) kemaslahatan atau kepatutan. *Ketiga*, dalam serap aspirasi, terutama kepada para kader diawali dengan 3 tahap pembelajaran politik; 1) pemahaman politik, 2) kesadaran politik, 3) partisipasi atau aktivitas politik. Secara struktural, proses penyerapan aspirasi dilakukan mulai di tingkat kabupaten dibawah kendali dewan pimpinan daerah, untuk kecamatan di bawah koordinasi dewan pimpinan kecamatan dan untuk tingkat kelurahan dibawah koordinasi pengurus ranting. Dalam kasus PKS, proses pembuatan kebijakan publik bukanlah proses yang bebas nilai. PKS senantiasa memasukkan nilai-nilai dakwah Islam dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Keempat*, dalam memperjuangkan kebijakan publik, PKS memiliki tiga prinsip; 1) prinsip syariah, 2) kajian secara hukum positif di Indonesia, 3) aspek kepatutan.

Selain itu, PKS dapat bermitra atau berkoalisi dengan pihak mana saja selama untuk kepentingan masyarakat, bahkan dengan pihak non-muslim sekalipun atau pihak yang garis ideologinya non-Islam.⁶

Kedua, penelitian tentang Gerak Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2008. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melandasi PKS mengusung Sarimuda adalah, terciptanya kesepakatan tertulis antara kedua pihak, tidak terlibatnya Sarimuda dalam struktural partai politik, dan banyak terlibatnya Sarimuda dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan. Sedangkan strategi yang digunakan adalah *direct marketing*, yang dalam jargonnya dikenal dengan MANTAP 125. MANTAP adalah jargon pasangan calon yang diusung sedangkan 125 adalah upaya strategis yang dilakukan yaitu, satu orang kader mempunyai tanggung jawab untuk mendatangi 25 rumah untuk mensosialisasikan dan mempromosikan pasangan yang diusung, pasangan MANTAP. Hasil akhirnya adalah pasangan HERO yang memenangkan pilkada dengan kemenangan mutlak. Kekalahan tersebut sangat berkaitan dengan persoalan popularitas HERO sebagai *incumbent* dan sokongan dan birokrasi di bawahnya.⁷

Ketiga, penelitian Gerakan Islam Di Indonesia. Temuan penelitiannya adalah PKS dan HTI lahir dari “rahim” yang sama yaitu berasal dari spirit gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir, walaupun kemudian HTI menarik diri dari

⁶ M. Zainal Anwar, *Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik*, (Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)

⁷ Ludiansyah, *Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Walikota Palembang 2008* (Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)

lingkaran pemikiran IM. Sedangkan PK Sejahtera secara konsisten melakukan transformasi pemikiran IM yang diadaptasikan dengan nilai-nilai keindonesiaan. Mengenai ide nasionalisme, PKS secara normatif-aplikatif menerimanya sebagai bagian dari ajaran Islam. Dimana dalam pandangan mereka Islam adalah agama yang *syumul* (lengkap) melingkupi semua aspek kehidupan manusia termasuk ide tentang nasionalisme. Sedangkan HTI secara idealis-formalis berbeda pandangan, menurut mereka nasionalisme adalah ide yang *absurd* dan menjadi penyebab perpecahan persatuan umat Islam. PKS mengakui eksistensi ideologi Pancasila sebagai obyektifikasi ajaran Islam dalam kehidupan bernegara, mengakui pluralitas, dan bercita-cita mewujudkan masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah *subhanahu wata'ala*, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan HTI memandang Pancasila sebagai *set of phylosophi* yang tidak mencukupi (*not sufficient*) untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena dia tidak memiliki sistem operasional.⁸

Selanjutnya penulis melacak hasil-hasil penelitian tentang rekrutmen caleg di PKS dan Golkar. *Pertama*, penelitian tentang proses rekrutmen anggota DPRD hasil pemilu 2004 di Kabupaten Wonogiri oleh Ahmad Sonhaji di FISIP Universitas Sebelas Maret. Fokus penelitian adalah seluruh anggota DPRD Wonogiri terpilih periode 2004-2009. Temuan penelitiannya adalah penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004 di Kabupaten Wonogiri belum bisa memenuhi azas proporsionalitas seperti yang diatur dalam pasal 107 Undang-

⁸ Moh. Muhatarom, *Gerakan Islam Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Nasionalisme* (Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008)

undang no.12 tahun 2003 yang menyatakan bahwa seseorang calon anggota legislatif (Caleg) apabila dapat memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) otomatis akan langsung terpilih dan ditetapkan sebagai anggota DPRD mewakili Daerah Pemilihannya (DP), sedangkan caleg yang perolehan suaranya tidak dapat memenuhi angka BPP, maka penetapan calon terpilih apabila partai politik yang mencalonkannya meraih kursi dari daerah pemilihannya, akan ditetapkan berdasarkan nomor urut pencalonan dari partai politik yang mencalonkannya. Ternyata sangat sulit dilaksanakan, meskipun ada 2 orang caleg yang bisa memenuhi ketentuan tersebut, kebetulan keduanya berasal dari partai politik yang sama, yang satu memperoleh 14.107 suara melebihi angka BPP di daerah pemilihannya sebesar 13.702 suara, sedang yang lain mendapat 20.378 suara melebihi angka BPP di daerah pemilihannya sebesar 13.568 suara. Namun demikian secara proporsional keanggotaan DPRD di Kabupaten Wonogiri belum bisa dikatakan memenuhi azas proporsionalitas, dilihat dari perbandingan antara yang bisa dengan yang tidak bisa memenuhi angka BPP, karena hanya ada 2 orang anggota atau 4,44 % yang bisa melampaui angka BPP sementara yang 43 orang atau 95,56 % diangkat menjadi anggota DPRD tanpa harus memenuhi angka BPP.⁹

Kedua, penelitian tentang pola rekrutmen caleg perempuan Partai Persatuan Pembangunan pada pemilu 1999 oleh Endang Sulastri tahun 2003. Pada Pemilihan Umum tahun 1999, jumlah perempuan yang direkrut oleh PPP hanya mencapai 9,41 % dari keseluruhan caleg DPR RI. Rendahnya jumlah caleg

⁹ Ahmad Sonhaji, *Proses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 Di Kabupaten Wonogiri*, (Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005)

perempuan ini disebabkan karena PPP dalam rekrutmen caleg perempuan, sering menggunakan standar ganda. Penentuan akhir untuk pilihan caleg diserahkan kepada Lembaga Penetapan Caleg dimasing-masing tingkatan pengurus. Anggota Lantap ini terdiri dari ketua Pimpinan partai dan beberapa orang anggota lain dari pengurus. Sedangkan dari hasil penelitian juga didapat bahwa jumlah perempuan dalam kepengurusan ini sangat terbatas. Struktur Organisasi yang sangat elitis, dimana penentu kebijakan adalah sebagian kecil elit tersebut, dan elit yang dimaksud didominasi oleh laki-laki menjadikan perempuan semakin terpinggirkan termasuk untuk memperoleh kesempatan direkrut menjadi caleg. Kondisi ini diperparah dengan adanya perspektif gender elit politik PPP yang ternyata dan hasil penelitian ini menunjukkan belum sensitif jender. Perspektif gender elit PPP dan penafsiran atas ideologi Islam yang digunakan merupakan faktor perpektif teologis yang amat berpengaruh dalam rekrutmen caleg perempuan termasuk faktor lain yaitu belum melembaganya organisasi PPP dalam bentuk aturan-aturan yang belum jelas dan terlembaga.¹⁰

Ketiga, penelitian tentang Pola rekrutmen caleg dan pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumatra Barat pada pemilu 2004: Studi Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang oleh Indah Putri Indriani tahun 2005. Permasalahan penelitian adalah bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan yang dilakukan Partai Golkar dan PBB serta apa pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan dua parpol ini di DPRD Propinsi Sumbar pada Pemilu 2004. Partai Golkar yang merupakan pemenang di dua pemilu terakhir, pada

¹⁰ Endang Sulastri, *Pola Rekrutmen Caleg Perempuan Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu 1999*, (FISIP Universitas Indonesia, 2003)

Pemilu 1999 berhasil menempatkan 4 orang perempuan dan 12 kursi yang diperolehnya, namun pada Pemilu 2004 ini meski terjadi kenaikan menjadi 16 kursi yang didapat justru tidak seorang pun perempuan. Sementara itu, PBB yang tidak menempatkan perempuan pada Pemilu 1999, pada Pemilu 2004 ini menempatkan 2 orang perempuan. Tulisan ini menggunakan teori Pipa Norris tentang sistem rekrutmen anggota legislatif, teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana rekrutmen yang dilakukan di dua partai tersebut. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa ada tiga aspek perbedaan pola rekrutmen caleg antara Partai Golkar dan PBB untuk DPRD Propinsi Sumbar pada Pemilu 2004 ini, yaitu sumber rekrutmen caleg, usulan pencalonan serta dalam penyusunan dan penentuan nomor urut caleg. Secara keseluruhan, ketentuan internal di PBB lebih menguntungkan caleg perempuan untuk dapat terpilih daripada di Partai Golkar. Hal tersebut kemudian dapat dilihat pengaruh yang diberikannya terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Sumbar, bahwa caleg perempuan terpilih dari PBB ada dua orang sementara tidak ada dari partai Golkar.¹¹

Keempat, mekanisme rekrutmen calon anggota DPRD oleh partai-partai politik dominan (Studi terhadap partai Golkar, PDIP dan PNBK di Kabupaten Lembata- Provinsi NTT) tahun 2005 oleh Quintus Irenius Suciadi. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa tampilnya elit-elit lama yang berhasil membangun kekuatan kembali lewat partai-partai politik dominan menjadi

¹¹ Indah Putri Indriani, *Pola Rekrutmen Caleg dan Pengaruhnya Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatra Barat Pada Pemilu 2004: Studi Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang* (FISIP Universitas Indonesia, 2005)

semakin kuat posisinya dan menjangkau sampai ke wilayah pedesaan. Elit-elit di tiga partai dapat menguasai seluruh proses politik, pemenangan caleg di DPRD, pemenangan bupati dan walikota dan penguasaan terhadap pundi-pundi ekonomi lokal. Ketiga partai yang diteliti ternyata memiliki jaringan yang kuat sampai di tingkat pelosok.¹²

Pola rekrutmen anggota DPRD oleh partai politik lama dan baru di Kabupaten Lampung Barat: Studi Kasus proses rekrutmen anggota DPRD oleh PDI-P dan PKS di Kabupaten Lampung Barat periode 2004-2009) oleh Maidar tahun 2005: 1. Pola rekrutmen anggota DPRD yang diterapkan oleh PDIP dan PKS sama-sama menerapkan sistem partisanship, namun terdapat tingkat tekanan yang berbeda. Jika PDIP tekanannya pada kedekatan seseorang dengan struktur partai, misal lamanya di partai, jabatannya di partai atau aktivitasnya di partai. Sedangkan PKS, penekanannya pada kedekatan dengan seseorang, misalnya selain pengurus inti partai, juga kader yang tidak diragukan lagi integritasnya, kapabilitas maupun moralitas. 2. Pola rekrutmen PDIP juga menggunakan sistem survival yakni merekrut caleg dengan pertimbangan caleg memiliki massa basis yang besar dan sumber ekonomi yang baik. Sedangkan PKS tidak menerapkan sistem survival, karena PKS merupakan partai baru, jadi dalam tahap konsolidasi partai. Namun PKS menerapkan sistem kompartementalis yakni merekrut caleg

¹² Quintus Irenius Suciadi, *Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh Partai-partai Politik Dominan: Studi Terhadap Partai Golkar, PDIP dan PNBK di Kabupaten Lembata-Provinsi NTT* (Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM, 2005)

dengan pertimbangan skill, profesional atau pengusaha. Sistem ini tidak diterapkan PDIP, karena lebih memprioritaskan pengurus partai.¹³

Pola rekrutmen calon anggota legislatif (Studi rekrutmen calon anggota legislatif partai Golkar dan PAN pada pemilu 2004 di Kota Jambi) tahun 2005 oleh Darmawan: 1. Partai Golkar di Jambi lebih banyak menggunakan pola rekrutmen *partisanhip* dimana lebih banyak mengakomodasi orang-orang yang telah lama dan mempunyai jasa besar pada partai. Tingkat loyalitas dan lama pengabdian menjadi pertimbangan penting. Demikian pula status kepengurusan, kedudukan dalam organisasi massa. Namun tingkat pendidikan dan kompetensi diakomodasi lebih rendah. 2. PAN menggunakan sistem meritokrasi yang mendorong kader-kadernya yang memiliki tingkat kompetensi tinggi, skill, tingkat pendidikan dan integritas moral untuk menjadi calon anggota legislatif. Baik partai Golkar maupun PAN tidak hanya menggunakan satu sistem saja, karena ada sebagian pengurus partai yang menjadi caleg karena kedekatannya dengan partai atau politik balas budi.¹⁴

E. Kerangka Toeritik

Dalam upaya membangun kesinambungan kehidupan suatu partai politik, maka partai politik perlu melakukan rekrutmen politik untuk mengisi

¹³ Maidar, *Pola Rekrutmen Anggota DPRD oleh Partai Politik Lama dan Baru di Kabupaten Lampung Barat: Studi Kasus Proses Rekrutmen Anggota DPRD oleh PDI-P dan PKS di Kabupaten Lampung Barat Periode 2004-2009* (Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2005)

¹⁴ Darmawan, *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: Studi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar dan PAN Pada Pemilu 2004 di Kota Jambi* (Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2005)

kepengurusan serta keanggotaan partai, termasuk untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam lembaga legislatif (parlemen). Selain itu, juga dimaksudkan untuk memperoleh kader-kader partai yang handal untuk memenangkan pertarungan merebut kekuasaan melalui pemilu.

Berkaitan dengan persoalan rekrutmen, Lester Seligman menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu, *pertama*, perubahan dari peranan non politik menjadi peranan politik yang berpengaruh, *kedua*, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus. Pengrekrutan meliputi baik pemenuhan syarat untuk mendapatkan status kaum elit dan seleksi atau penetapan pada posisi-posisi elit yang khusus.¹⁵ Relevansinya dalam konteks kajian permasalahan yang akan diteliti bahwa rekrutmen politik adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan memenuhi prasyarat untuk menduduki jabatan politik. Lebih khusus lagi, rekrutmen caleg adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat dan telah memenuhi parasyarat untuk menjadi anggota legislatif, baik dalam proses penjaringan maupun penyaringan calon.

Sistem rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara Geddes mengklasifikasikan rekrutmen menjadi empat model: Pertama, *partisanship*, yakni rekrutmen politik dari partai politik yang dinilai atas loyalitasnya pada partai dan berusaha mengumpulkan partisan dan kurang memperhatikan kompetensi. Kedua, *meritocratic* yakni rekrutmen politik dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli.

¹⁵ Lester G. Seligman, "Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik" dalam *Elit dan Modernisasi* (ed) Aidit dan Zaenal AKSP (Yogyakarta: Liberty, 1989) hlm. 15-16

Ketiga, *Compartmentalization* yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada pengangkatan meritokratis informal bagi posisi-posisi yang dipertimbangkan sebagai penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama memungkinkan untuk menggunakan pengangkatan-pengangkatan lain untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal. Keempat, *survival* yakni rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.¹⁶

Pada umumnya proses rekrutmen politik dapat dilakukan dengan beberapa cara atau sifat. Terdapat ada dua cara untuk melakukan rekrutmen politik yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Rekrutmen politik terbuka mengandung makna bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta mempunyai bakat, tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Sebaliknya, rekrutmen politik tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan-kawan akrab penguasa, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis bahkan keluarga dari pihak penguasa.¹⁷ Berdasarkan uraian tersebut, maka rekrutmen politik adalah suatu proses pemilihan atau penyeleksian (penjaringan dan penyaringan) dan pengangkatan individu-individu tertentu ke dalam sistem kekuasaan melalui cara-cara tertentu,

¹⁶ Barbara Geddes, *Politician's Dilema: Building State Capacity In Latin America* (University California Press, 1996) hlm. 78-79

¹⁷ Lili Romli, *Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 2004*, (Jakarta: LIPI, 2005), hlm. 19

yaitu melalui sistem terbuka dan sistem tertutup. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih jauh tentang sistem rekrutmen politik.

Secara teoritis, rekrutmen dengan sistem terbuka berarti menerapkan *merit system*, yaitu suatu seleksi menurut kualifikasi teknis, rasional dan impersonal. Rekrutmen caleg harus mencerminkan perwakilan yang sebenarnya dari masyarakat. Seleksi anggota legislatif harus memenuhi syarat-syarat kapabilitas, popularitas dan akseptabilitas. Ketiga syarat ini harus dipadukan. Artinya seseorang kandidat harus benar-benar memiliki kemampuan, populer di tengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat serta terpilih melalui prosedur perwakilan, bukan hanya sekadar ditunjuk.¹⁸

Dalam sistem rekrutmen terbuka ini, setiap warga bebas berkompetisi untuk menjadi caleg tanpa tekanan dan batasan-batasan tertentu oleh kekuatan eksternal. Suasana kompetisi untuk mengisi jabatan biasanya sangat tinggi, sehingga orang-orang yang benar-benar sudah teruji saja yang akan berhasil keluar sebagai pemenang. Ujian tersebut biasanya menyangkut visinya tentang keadaan masyarakat, atau yang dikenal sebagai *platform* politiknya serta nilai moral yang melekat dalam dirinya termasuk integritasnya.¹⁹

Sementara itu pola rekrutmen dengan sistem tertutup dikenal dengan sistem nepotisme dan sistem spoil. Nepotisme dapat diartikan sebagai usaha untuk memilih dan mengangkat seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak yang berkuasa dalam sistem kekuasaan. Sedangkan sistem spoil dapat

¹⁸ Riswanda Imawan, *Proses Pencalonan dan Calon Dalam Pemilu Legislatif 1992*, (Surabaya: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 1992), hlm. 12

¹⁹ Affan Ghaffar, "Demokrasi Empiris Dalam Era Orde Baru" dalam Alfian Dan Nazaruddin Syamsuddin, *Budaya Politik Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1991). hlm. 24

disebut sebagai usaha untuk mendudukkan orang tertentu ke dalam jenjang kekuasaan karena memiliki hubungan aliran ideologi, pandangan hidup yang sama dengan pihak yang sedang berkuasa. Berpedoman kepada dua sistem rekrutmen di atas, dapatlah dipahami bagaimana seharusnya rekrutmen yang ideal bagi caleg. Seharusnya sistem terbuka menjadi pilihan yang tak boleh ditawarkan dengan mempertimbangkan perwakilan, kapabilitas, popularitas, dan akseptabilitas.²⁰

Kedua, teori kelembagaan. Terdapat tiga varian analisis kelembagaan yang berkembang di Barat yakni logika kesesuaian (*logic of appropriateness*), individu belajar melalui keanggotaannya. Preferensi individu ditentukan oleh lembaga yang ada di sekitarnya. Logika ini bertolak belakang dengan logika konsekwensi (*logic of consequentiality*) bahwa individu yang berfungsi dalam organisasi berperilaku sebagai mana adanya karena ada standar normatif dan lembaga merupakan penyimpanan nilai sosial utama. Versi pilihan rasionalis dari institusionalisme bahwa lembaga merupakan susunan aturan dan insentif dan anggota-anggota lembaga berperilaku dalam merespon komponen dasar struktur kelembagaan.²¹

Lembaga adalah organisasi formal yang menghasilkan perubahan dan melindungi perubahan. Aspek perubahan kelembagaan sangat penting baik perubahan dalam internal lembaga (proses institusionalisasi /de institusionalisasi) dan perubahan dalam nilai dan atau struktur yang dianggap mencirikan lembaga.²²

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Rajawali, 1992) hlm. 118

²¹ B. Guy Peter, *Institutional Theory: Problem and Prospect Political Science* Series 69, Institute for Advance Studies, Viena 2000.

²² R.A.W. Rhodes, "The Institutional Approach" dalam David Marsh and Gerry Stoker, *Theory and Methode in Political Science* (London: Oxford University, 2001) hlm. 50-51

Kaum institusionalis telah mengembangkan sistem pemerintahan secara rinci dalam dua kutub versi masyarakat menitis versus masyarakat majemuk. Kaum institusionalis mengambil pandangan jangka panjang dengan mendukung perubahan yang lambat dalam perdebatan di parlemen dan menaruh perhatian pada pembaruan sebagai sarana untuk menyempurnakan demokrasi dengan cara 1. memperluas kekuasaan libertarian untuk mengembangkan pilihan publik melalui kebijakan-kebijakan yang efektif. 2. Menetapkan ikatan komunitas dan Negara dengan mengubah sistem partai dan sistem legislatif. 3. Mendukung kedaulatan rakyat untuk menjamin kesetiaan dan kerjasama warga Negara.²³ Lembaga dapat bertindak sebagai variable yang mempengaruhi (*independent variable*) di mana perbedaan dalam lembaga akan membuat perbedaan dalam kebijakan. Ini berarti adanya lembaga politik seperti PKS dan Golkar memberikan perbedaan kebijakan di tingkat partai dan anggota partai. Namun lembaga juga dapat bertindak sebagai variable yang dipengaruhi (*dependen variable*) yakni partai politik sebagai variable yang mempengaruhi, bisa mempengaruhi organisasi dalam rekrutmen politik.²⁴

F. Metode Penelitian

F. 1. Model Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dukungan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.²⁵ Data kualitatif juga

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-Press, 1992) hlm. 16

diperoleh dari sejumlah penelitian sebelumnya dengan tema terkait yang menyediakan data-data terkait berkenaan dengan rekrutmen caleg partai-partai politik di sejumlah daerah dalam pemilu legislatif 2004. Data yang diperoleh adalah hasil pengamatan (observasi) dan wawancara tentang rekrutmen caleg DPD PKS dan DPD Golkar di DPRD kota. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pengurus DPD II PKS kota, pengurus DPD II Golkar kota, ketua dan anggota KPU kota dan sekretariat DPRD kota dan akademisi Universitas Gadjah Mada (FISIPOL).

Dalam wawancara dengan narasumber pengurus DPD II PKS kota, yang menjadi narasumber adalah Muhammad Rosyidi, ST, MT (Ketua DPD PKS kota), Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi, (Sekretaris Umum DPD PKS kota dan sekaligus ketua Tim PANJATIDA –Tim Penjaringan Mutiara Daerah DPD PKS kota dan Muhammad Yuniardi, SP (ketua Bidang Pembinaan Kader dan sekretaris Tim PANJATIDA). Narasumber pengurus DPD II partai Golkar adalah Drs. Suhartono, ST, (ketua DPD Golkar kota dan ketua Tim 7 rekrutmen caleg Golkar kota), Bambang Seno Baskoro, ST, wakil ketua DPD Golkar kota dan anggota Tim 7), Agusnur, SH, SIP, (sekretaris DPD Golkar kota dan anggota Tim 7). Dari unsur KPU, yang menjadi narasumber penelitian adalah Nasrullah, SH, M.Ag, MCL (ketua KPU kota dan anggota KPU Provinsi DIY) dan Aan Kurniasih, SH (anggota KPU kota dan ketua Tim Verifikasi Daftar Calon Pemilih). Data hasil wawancara langsung dengan pengurus DPD II PKS dan DPD II Golkar kota merupakan data primer.

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan bebijak pada pedoman wawancara terstruktur yang memuat masing-masing 30 daftar pertanyaan untuk DPD PKS dan DPD Golkar. Untuk KPU dan sekretariat DPRD kota masing-masing 8 daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada responden dengan memberikan kebebasan untuk menjawab pertanyaan, namun jika jawaban kurang mengenai sasaran, peneliti menjelaskan kembali pertanyaan sebelumnya dan menjelaskannya secara sistematis kepada responden.²⁶ Wawancara dilakukan di kantor Fraksi PKS dan Fraksi Golkar di DPRD kota, KPU kota dan sekretariat DPRD kota antara 24 November 2009-10 Januari 2010.

Data-data sekunder yang terkait dengan teori rekrutmen caleg, kecenderungan dan karakter caleg diperoleh dalam buku, tesis dan makalah di jurnal. Penulis berusaha merujuk buku standar dalam dunia akademik, kecuali buku standar tidak ditemukan, penulis menggunakan pendapat dalam buku skunder. Salah satu buku primer adalah karya Lester G. Seligman, *Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik*, diterbitkan Liberty, Yogyakarta pada 1999 dan karya Barbara Geddes, *Politician's Dilema: Buliding State Capacity In Latin America* diterbitkan University California Press pada 1996. Untuk mempertajam pembahasan dalam komparasi hasil wawancara dengan teori-teori yang terdapat dalam buku, penulis juga melakukan wawancara dengan ahli politik dan pemilu di kota Yogyakarta yaitu Nanang Indra Kurniawan, S.IP, MA di Fisipol Universitas Gadjah Mada.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1973) hlm. 226

Menurut Moleong, pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap permasalahan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Pendekatan ini lebih efektif karena di dalam melakukan wawancara terjadi hubungan langsung antara peneliti dan informan.²⁷

F. 2. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data hasil observasi mendalam, wawancara dan dokumentasi dilakukan dengan teknik triangulasi terhadap sumber data maupun teknik pengumpulan data. Terdapat empat teknik triangulasi sebagai metode pemeriksa yang memanfaatkan pengguna sumber, metode, penyidik, dan teori.²⁸ Dalam penelitian ini dipilih jenis triangulasi dengan sumber dan teori. Hal ini dilakukan dengan beberapa prosedur, yaitu (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan subjek penelitian di forum publik dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) mengkonfirmasi hasil wawancara dari antara satu subjek dengan subjek lainnya, (4) membandingkan hasil wawancara dengan laporan dokumen-dokumen yang berkaitan.

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesdakarya, 1998), hlm. 125-126

²⁸ *Ibid*, hlm. 178.

F. 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah Comparative analysis atau analisis perbandingan, yakni teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara obyektif dan sistematis pola perbandingan antara dua fenomena politik yang terjadi dalam satu waktu. Tipe analisis dalam penelitian ini adalah Comparative analysis dalam studi kasus (*Case Studies*). Jadi studi ini merupakan Comparative analysis secara deduktif yang berangkat dari sejumlah teori tentang mekanisme rekrutmen yang telah tersusun dalam studi-studi sebelumnya, dengan studi kasus yang terjadi di DPD PKS dan DPD Golkar kota Yogyakarta.²⁹

Umumnya Comparative analysis atau analisis perbandingan digunakan dalam dua cara yakni *internl comparison* (perbandingan internal- perbandingan fenomena khusus antar waktu, antar ruang dan budaya dalam rangka mencari variasi pola persamaan dan perbandingan) dan *external comparison* (perbandingan eksternal- perbandingan dua atau lebih fenomena politik yang terjadi dalam waktu yang berbeda seperti kejadian politik dimasa Orde Baru dan Reformasi, perbandingan dalam budaya politik di beberapa komunitas masyarakat yang berbeda untuk mencari pola persamaan dan perbedaan antar fenomena politik yang ada).³⁰ Dalam penelitian ini, perbandingan mekanisme rekrutmen caleg DPD PKS dan DPD Golkar masuk dalam kategori *internl comparison* (perbandingan internal) karena hanya membandingkan dua mekanisme rekrutmen

²⁹ Tom Mackie and David Marsh, *The Comparative Methode*, in (ed) David Marsh and Gerry Stoker, *Theory and Methode in Political Science* (London: Oxford University Press, 1999), hlm. 174-176

³⁰ Charles Ragin, *Issues and Alternative in Comparative Social Research*, (Leiden: E.J Brill, 1991), hlm. 178

untuk menentukan pola perbandingan dua partai (Islam dan Nasionalis) dalam satu ruang dan waktu yang terjadi pada fenomena rekrutmen caleg partai-partai tahun 2009 di kota Yogyakarta.

Data hasil analisis isi kemudian disajikan secara terstruktur dengan maksud supaya mudah dipahami. Pada bagian akhir tesis ini, sejumlah pokok kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis dan pembahasan atas data. Pokok-pokok kesimpulan ini merupakan temuan-temuan utama yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah memverifikasi data selama penelitian berlangsung. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan langkah-langkah yang terkait dan dikerjakan secara berkesinambungan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini ditulis dalalam lima bab. Bab satu tentang problem-problem yang melingkupi wilayah studi rekrutmen politik caleg DPRD di era reformasi. Rekrutmen merupakan arena untuk membangun kaderisasi, regenerasi, dan seleksi para kandidat serta membangun legitimasi dan relasi antara partai dengan masyarakat sipil. Namun sejumlah problem rekrutmen caleg masih terjadi dalam PKS dan partai Golkar pada pemilu 2009. Bab satu penulis mendorong upaya pemetaan problem rekrutmen dan kendala-kendala yang dihadapi DPD PKS dan DPD Golkar. Pemetaan problem ini mempermudah analisis dan pembahasan yang dikaitkan dengan teori.

Bab dua membahas peta kekuatan politik kota Yogyakarta dalam pemilu legislatif 2009. Pembahasan ini menelaah kontestasi partai-partai peserta pemilu legislatif di kota Yogyakarta 2009 dalam memperebutkan kursi di DPRD kota. Kontestasi ini lebih menarik jika dilihat dalam pertarungan perimbangan kekuatan partai-partai Islam (PKS, PPP, PKNU) versus partai nasionalis baru dan lama (Golkar, PDIP dan Demokrat). Hasil perolehan suara dan kursi DPRD partai-partai peserta pemilu ini sebagai penguat demokratisasi sistem kepartaian dan kelembagaan DPRD.

Bab tiga membahas tentang mekanisme rekrutmen DPD PKS dan DPD Golkar di DPRD kota dalam proses penjaringan, proses penyaringan dan proses penetapan serta profil para caleg. Yang menarik juga adalah aktor-aktor dibalik penetapan caleg jadi dan penetapan nomor urut. Pola yang diterapkan kedua partai ini dalam rekrutmen memiliki persamaan dan perbedaan untuk menentukan kualitas calon, dedikasi dan loyalitas serta prospek calon untuk menang. Dalam bab ini, profil caleg DPD PKS dan DPD Golkar dikategorikan dalam model rekrutmen yang dikembangkan oleh Barbara Geddes yakni *partisanship*, *meritokrasi* dan *survival*. Kategorisasi dalam tiga model ini, menuntun pembentukan kecenderungan dan pola yang dibahas dalam bab IV.

Bab empat membahas kecenderungan dibalik pencalonan caleg lokal di kota Yogyakarta. Dalam upaya menterjemahkan Undang-undang nomor 10 tahun 2008, DPD PKS dan DPD Golkar mendesain mekanisme internal sebagai pedoman dalam penyusunan dan seleksi caleg. Dengan penerjemahan yang berbeda-beda di antara kedua partai, terdapat beberapa kecenderungan yang sama

dan kecenderungan yang berbeda, sebagai konsekuensi atas pilihan pola pelebagaan pencalonan yang dianut kedua partai. Pola pelebagaan yang dianut kedua partai membedakan hasil profil caleg dan perbedaan kecenderungan oligharkis kedua partai. Dalam melacak fenomena oligharkis, bab ini mendudukan oligharkis dalam fenomena sejarah yang terbentuk secara melembaga selama pemerintahan Orde Baru. Dua model pelebagaan pencalonan legislatif yang diciptakan baik secara langsung dan tidak langsung, dalam bab IV ini berusaha mencari alternatif terbaik pola pencalonan yang ideal dengan semangat proporsional dan terbuka.

Bab lima merupakan ringkasan atas temuan-temuan baru sebagai kesimpulan penelitian serta saran-saran tindak lanjut atas penelitian berikutnya. Temuan-temuan dan saran-saran dalam bab IV dapat digunakan oleh partai politik sebagai bentuk evaluasi penentuan calon legislatif lokal lima tahun mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang dilakukan di bab III dan IV mendapatkan dua kesimpulan pokok yakni:

1. DPD PKS membangun pelembagaan moderat (*pola pelembagaan pencalonan sedang/moderat*). DPD PKS menyerahkan proses administrasi caleg pada Tim PANJATIDA. Daftar caleg dibawa dalam rapat pleno PUI yang terdiri atas unsur DPD PKS, Tim PANJATIDA untuk mengesahkan caleg dan penetapan dan penempatan caleg. Semua kader tingkat Madya ke atas dalam rapat pleno PUI DPD PKS memiliki hak suara yang sama untuk memilih caleg yang duduk dalam daftar caleg resmi DPD PKS. Semua kader dapat menjadi saksi atas dedikasi, loyalitas, komitmen caleg yang didistribusikan di tiap dapil. Sedangkan DPD Golkar cenderung menganut pola pelembagaan pencalonan caleg secara optimal (*pelembagaan optimal*). Tim 7 memiliki wewenang penuh dalam menentukan skor caleg, penempatan nomor urut, memutuskan dan mengesahkan jumlah caleg lolos dan tidak lolos seleksi Tim 7. Pola ini mengkategorikan Tim 7 dalam kategori oligharkis optimal. Kedua partai sama-sama menerapkan usulan dari bawah atau *buttom-up*.
2. Terdapat kecenderungan yang sama dibalik proses pencalonan terutama dalam konteks mekanisme pencalonan dan penetapan caleg.

Pertama, dari segi prosedur dan mekanisme pencalonan, elite kedua partai di kota Yogyakarta ternyata sangat diuntungkan dengan adanya pedoman penyusunan caleg. *Kedua*, proses pencalonan caleg kedua partai didominasi oleh pemenuhan aspek-aspek teknis-administratif ketimbang kualifikasi dan kualitas para calon seperti pengabdian, komitmen dan loyalitas terhadap partai ketimbang kemampuan dan komitmen serta aspirasi dan kepentingan masyarakat. *Ketiga*, proses pencalonan caleg berlangsung tertutup di antara lingkungan internal DPD PKS dan DPD Golkar dan sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat.

Sebaliknya, terdapat kecenderungan yang berbeda dibalik proses pencalonan yakni, *pertama*, perbedaan wewenang yang dimiliki Tim penjaringan kedua partai. Kewenangan Tim PANJATIDA dikontrol Tim DPD PKS dan Tim Dewan Syuro, sedangkan kewenangan Tim 7 bersifat mutlak. *Kedua*, perbedaan dalam penentuan skoring caleg. Skor caleg DPD PKS tidak ditentukan berdasarkan jabatan di partai, namun kualitas kerja caleg di tingkat apapun (DPD sampai DPRa). Sedangkan skor caleg DPD Golkar ditentukan berdasarkan jabatan di partai. *Ketiga*, penetapan daftar caleg DPD PKS berikut nomor urutnya dilakukan dalam rapat PUI antara Tim PANJATIDA, DPD PKS dan Dewan Syura serta semua kader PKS (*inklusif*), sedangkan penetapan daftar caleg DPD Golkar dilakukan Tim 7 (*eksklusif*).

B. Saran-saran

1. Penelitian tentang rekrutmen caleg di tingkat lokal harus tetap dilakukan untuk menguji partai-partai dalam menentukan kualitas caleg yang diajukan dalam pemilu. Penelitian rekrutmen caleg di tingkat lokal lebih kompleks, mengingat banyaknya caleg-caleg baru yang muncul tidak hanya di kota Yogyakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain. Semakin banyak caleg yang muncul, problem kualitas selalu menjadi ancaman baru bagi pembangunan demokrasi.
2. Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini terbatas pada perbandingan rekrutmen caleg DPD PKS dan DPD Golkar di kota Yogyakarta. Namun studi ini memberi sumbangan pemikiran terhadap proses rekrutmen caleg kedua partai (PKS dan Golkar) untuk menjadi pertimbangan atas kekurangan dalam rekrutmen caleg 2009 menuju pemilu legislatif 2014. DPD PKS kota harus mempertahankan rekrutmen terhadap kader-kader muda partai sebagai penggerak utama dan kader perempuan tanpa ada pilih kasih. Di sisi lain DPD PKS juga harus mempertimbangkan kader di luar partai yang mumpuni untuk dijadikan caleg, bukan hanya sekedar merekrut tokoh sebagai *vote gater* (strategi mendulang suara).

DPD partai Golkar harus merubah pola rekrutmen caleg yang eksklusif menjadi inklusif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kader di segala tingkatan. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus teras saja yang dapat dijadikan kandidat. Hasil studi ini juga

menyarankan pada DPD Golkar untuk membentuk dewan pengawas rekrutmen caleg agar persaingan menuju kursi caleg partai dapat dilakukan lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Retno. *Gagalnya Politisi Perempuan di Parlemen dan Pengaruhnya Terhadap Pengembangan Karir Politik Perempuan*, Yogyakarta: Koalisi Perempuan Indonesia, 2009
- Anwar, M. Zainal. *Peran Politik Partai Keadilan Sejahtera Kotamadya Yogyakarta Dalam Kebijakan Publik*, Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Azwar, Rully Khairul. *Pengembangan Sumber Daya Partai Politik: Rekrutmen dan Kaderisasi di Partai Golkar*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2007
- Assiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*, California: Wadsworth Publishing Company, 1983
- Budiharjo, Miriam. *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Denny JA., *Tipologi Partai Politik dan Prospeknya di Indonesia*, dalam Maruto MD dan Anwari WMK (ed.), dalam, *Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat; Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi*, Jakarta : LP3ES, 2002
- *Various Topics in Comparative Politics*, Surabaya : Jayabaya University Press, 1999
- Darmawan, *Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif: Studi Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar dan PAN Pada Pemilu 2004 di Kota Jambi*, Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2005
- Duverger, Maurice. *Political Parties: Their Organization and Activity In The Modern State*, London : Methuen & CO. LTD, 1959
- Fuad, Rieta. *Perempuan dan Politik: Kepatuhan Partai Golkar, PDI-P dan PKB terhadap pemberlakuan kuota 30% perempuan bagi caleg DPR RI*, FISIP Universitas Indonesia, 2006
- Ghaffar, Affan. "Demokrasi Empiris Dalam Era Orde Baru" dalam Alfian Dan Nazaruddin Syamsuddin, *Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1991
- Geddes, Barbara . *Politician's Dilema: Buliding State Capacity In Latin America*, University California Press, 1996

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1973
- Haris, Syamsuddin. *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilihan Umum 1997, 1999*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999
- Indriani, Indah Putri. *Pola Rekrutmen Caleg dan Pengaruhnya Terhadap Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatra Barat Pada Pemilu 2004: Studi Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang*, FISIP Universitas Indonesia, 2005
- Imawan, Riswanda. *Proses Pencalonan dan Calon Dalam Pemilu Legislatif 1992*, (Surabaya: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 1992
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986
- Khoiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi Menakar Kinerja Parpol Era Transisi di Indonesia* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005
- Kymlika, Willy. *Kewargaan Multikultural*, Terj. Edlina Hafmini Eddin, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2002
- Lev, Daniel S.. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.
- Ludiansyah, *Partai Politik Islam Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Studi Tentang Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Walikota Palembang 2008*, Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Mackie, Tom and David Marsh, *The Comparative Methode*, in (ed) David Marsh and Gerry Stoker, *Theory and Methode in Political Science* (London: Oxford University Press, 1999
- Mata, Anis. *Sekilas Partai Keadilan*, Jakarta: Sekretariat DPP Partai Keadilan, 1998
- M.B. Miles dan A.M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta: UI-Press, 1992
- Maidar, *Pola Rekrutmen Anggota DPRD oleh Partai Politik Lama dan Baru di Kabupaten Lampung Barat: Studi Kasus Proses Rekrutmen anggota DPRD oleh PKS di Kabupaten Lampung Barat Periode 2004-2009* (Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2005

- Marian-Nicu, Spinu dan Sturz Adina-Eleonora, *The Advantages and Disadvantages of The Personnel's Recruitment Intern Sources*, London: Institute of Personnel and Development, 1996
- Mas'oed, Mohtar. *Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Michels, Robert. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis Dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 1984
- Moloeng, Lexy J. . *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Roesdakarya, 1998
- Mosca, Gaetano. *The Ruling Class*, New York: McGrew Hill, 1939
- Muhatarom, Moh.. *Gerakan Islam Di Indonesia: Studi Komparatif Antara Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Nasionalisme*, Program Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2008
- Najib, Mohammad. *Pasal-pasal Krusial Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yogyakarta: UGM, 2008
- *Penentuan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD Dalam Pemilu Legislatif*, Yogyakarta: UGM, 2008
- Nalenan, Josef Christofel. *Pendidikan Politik, Parpol dan Pemilu Legislatif 2009*, (Jakarta: Jaringan Pemilih Pemilu Rakyat, 2008
- Pareto, Vilfredo. *The Mind and Society*, New York: Harcourt Brace, 1913
- Peter, B. Guy. *Institutional Theory: Problem and Prospect Political Science Series 69*, Institute for Advance Studies, Vienam 2000
- Pamungkas, Sigit. *Afiliasi Pemilih Nasionalis dan Ideologi Dalam Pemilu Legislatif 2009*, Yogyakarta: UGM, 2008
- *Tingkat Partisipasi Dan Segmentasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif Di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Pusat Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, 2008
- Philips, Anne. *The Politics of Presence: The Political Representation of Gender, Ethnicity and Race*, Oxford: Clarendon Press, 1995
- Ragin, Charles. *Issues and Alternative in Comparative Social Research*, (Leiden: E.J Brill, 1991

- Rhodes, R.A.W. . “The Institutional Approach” dalam David Marsh and Gerry Stoker, *Theory and Methode in Political Science*, London: Oxford University, 2001
- Rodee, C. C. *.Pengantar Ilmu Politik*, Terj. Zulkifli Hamid , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000
- Romli, Lili. *Demokrasi Dalam Bayang-bayang Kekuatan Jawara: Studi Kasus Pencalonan Caleg Di Provinsi Banten 2004*, Jakarta: LIPI, 2005
- Seligman, Lester G.. “Perekrutan Kaum Elit dan Pembangunan Politik” dalam *Elit dan Modernisasi* (ed) Aidit dan Zaenal AKSP, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Seseda, Francisias. *Legislative Recruitment and Electoral System in Indonesia*, Jakata: Fisip UI, 2007
- Sonhaji, Ahmad. *Proses Rekrutmen Anggota DPRD Hasil Pemilu 2004 Di Kabupaten Wonogiri*, Surakarta: FISIP Universitas Sebelas Maret, 2005
- Suciadi, Quintus Irenius. *Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota DPRD oleh Partai-partai Politik Dominan: Studi Terhadap Partai Golkar, PDIP dan PNBK di Kabupaten Lembata- Provinsi NTT*, Yogyakarta: Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM, 2005)
- Sulastrri, Endang. *Pola Rekrutmen Caleg Perempuan Partai Persatuan Pembangunan Pada Pemilu 1999*, FISIP Universitas Indonesia, 2003
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Rajawali, 1992
- Tim Fisipol UGM, Laporan Akhir Penyusunan Konsep Perumusan pengembangan Kebijakan Pelestarian Nilai-nilai Kemasyarakatan (social Capital), Yogyakarta, 2000
- Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics In Western Europe: Britania, France, Italy and Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998

Dokumen

AD/ ART Dewan Pimpinan Pusat PKS

AD/ ART Dewan Pimpinan Pusat partai Golkar

Biro Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta Dalam Angka* dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hasil rekapitulasi resmi pemilu legislatif 2009 untuk penetapan anggota DPDRD, KPU kota Yogyakarta

Hasil rekapitulasi resmi pemilu legislatif 2004 untuk penetapan anggota DPDRD, KPU kota Yogyakarta

Undang-undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10/2008 tentang Pemilu Legislatif

DAFTAR PERTANYAAN

DPD PKS kota Yogyakarta

(Narasumber: Muhammad Rosyidi, ST. MT, Bambang Anjar Jalumurti, S. Pi dan Muhammad Yuniardi, SP)

1. Bagaimana proses penjaringan Caleg PKS DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014
2. Siapa yang dilibatkan dalam proses penjaringan caleg PKS
3. Apa syarat-syarat menjadi caleg PKS di DPRD
4. Bagaimana proses penjaringan Caleg PKS disosialisasikan: Media, kantor DPD partai atau sosialisasi lewat pengurus yang turun ke lapangan.
5. Berapa lama proses penjaringan Caleg PKS
6. Dalam proses pendaftaran caleg bersifat aktif atau pasif: Mendaftar sendiri atau telah ditunjuk oleh pengurus di tiap tingkatan (dari Desa sampai Kabupataen/ Kota)
7. Berapa caleg PKS yang usulkan PAC ke DPD partai dan berapa komposisi PAC PKS dan pengurus DPD PKS
8. Bagaimana skor caleg PKS: Pengurus DPD dan non pengurus
9. Bagaimana *fit* dan *proper test* diterapkan bagi caleg PKS
10. Bagaimana perolehan suara PKS jika dibandingkan pemilu 2004 dan 2009
11. Berapa jumlah kursi yang diperoleh PKS di DPRD jika dibandingkan pemilu 2004 dan 2009
12. Bagaimana strategi pemenangan pemilu bagi caleg PKS di DPRD
13. Berapa jumlah caleg PKS yang diusulkan DPD Partai kota ke KPUD kota Yogyakarta di 5 Dapil
14. Berapa jumlah caleg PKS yang lolos verifikasi administrasi di KPUD Kota
15. Berapa jumlah caleg PKS yang lolos jadi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 dalam tiap Dapil

16. Bagaimana profil caleg PKS: a. Agama, b. Pendidikan, c. Pengalaman organisasi (aktivis – nonaktivis, partai dan non partai, sayap partai, LSM), d. Anggota DPRD –non anggota DPRD, e. Tua – muda, f. Muka lama –muka baru, g. Pekerjaan : Pensiunan PNS, pengusaha, professional dan mantan TNI, h. Penghasilan, i. Gender. Bagaimana kombinasi 50:50 untuk regenerasi PKS kedepan
17. Bagaimana proses penyaringan Caleg PKS untuk DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014
18. Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalam proses penyaringan caleg PKS
19. Bagaimana proses penetapan Caleg PKS untuk DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014
20. Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalam proses penetapan caleg PKS
21. Bagaimana proses penetapan nomor urut Caleg PKS untuk DPRD: Nomor urut topi dan nomor urut sepatu
22. Apakah ada proses negosiasi yang alot dalam penetapan nomor urut Caleg DPRD
23. Siapa yang paling mendominasi atau paling berwenang dalam penetapan nomor urut Caleg DPRD: Ketua DPD, Tim khusus DII
24. Apa yang paling menentukan caleg PKS bisa duduk di nomor urut tertentu: Dekat dengan pengurus, keluarga, pengaruh sosial dan basis massa, kekuatan financial, loyalitas pada partai DII.
25. Berapa dana yang harus disetorkan caleg PKS ke partai sebagai wakaf
26. Apakah setiap nomor urut berbeda dana yang disetor ke partai
27. Apakah nomor urut memiliki mitos tertentu
28. Apakah ada caleg PKS yang minta ditempatkan dinomor tertentu
29. Bagaimana mengatasi gejolak ketidakpuasan caleg dalam penetapan nomor urut

30. Bagaimana pengaruh social dalam penetapan caleg PKS: Diprioritaskan atau tidak (Keluarga lingkungan keraton, keluarga trah ulama, keluarga pejuang veteran, keluarga elit di jogja yang menguasai sumber-sumber ekonomi, Dll)

DAFTAR PERTANYAAN

DPD Golkar Kota Yogyakarta

**(Narasumber: Drs. Suhartono, ST, Bambang Seno Baskoro, ST
dan Augustnur, SH, S. IP)**

1. Bagaimana proses penjaringan Caleg Golkar DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014
2. Siapa yang dilibatkan dalam proses penjaringan caleg partai Golkar
3. Apa syarat-syarat menjadi caleg partai Golkar di DPRD Bagaimana proses penjaringan Caleg disosialisasikan: Media, kantor DPD partai. atau sosialisasi lewat pengurus yang turun ke lapangan
4. Berapa lama proses penjaringan Caleg partai Golkar
5. Dalam proses pendaftaran caleg partai Golkar bersifat aktif atau pasif: mendaftar sendiri atau telah ditunjuk oleh pengurus di tiap tingkatan (dari Desa sampai Kabupataen/ Kota)
6. Berapa caleg partai Golkar yang usulkan PAC ke DPD partai dan berapa komposisi PAC dan DPD
7. Bagaimana skor caleg partai Golkar: Pengurus DPD dan non pengurus
8. Bagaimana *fit* dan *proper test* diterapkan caleg partai Golkar
9. Bagaimana perolehan suara partai Golkar jika dibandingkan pemilu 2004 dan 2009
10. Berapa jumlah kursi yang diperoleh partai Golkar di DPRD jika dibandingkan pemilu 2004 dan 2009
11. Bagaimana strategi pemenangan pemilu bagi caleg partai Golkar di DPRD
12. Berapa jumlah caleg partai Golkar yang diusulkan DPD Partai kota ke KPUD kota Yogyakarta di 5 Dapil
13. Berapa jumlah caleg partai Golkar yang lolos verifikasi administrasi di KPUD

14. Barapa jumlah caleg partai Golkar yang lolos jadi anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014 dalam tiap Dapil
15. Bagaimana profil caleg partai Golkar: a. Agama, b. Pendidikan, c. Pengalaman organisasi (aktivis – nonaktivis, partai dan non partai, sayap partai, LSM), d. Anggota DPRD –non anggota DPRD, e. Tua – muda, f. Muka lama –muka baru, g. Pekerjaan : Pensiunan PNS, pengusaha, professional dan mantan TNI, h. Penghasilan, i. Gender. Bagaimana kombinasi 50:50 untuk regenerasi partai kedepan
16. Bagaimana proses penyaringan Caleg partai Golkar untuk DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014
17. Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalam proses penyaringan caleg partai Golkar
18. Bagaimana proses penetapan Caleg partai Golkar untuk DPRD Kota Yogyakarta periode 2009-2014
19. Siapa yang dilibatkan atau diberi wewenang dalam proses penetapan caleg partai Golkar
20. Bagaimana proses penetapan nomor urut Caleg partai Golkar untuk DPRD: Nomor urut topi dan nomor urut sepatu
21. Apakah ada proses negosiasi yang alot dalam penetapan nomor urut Caleg DPRD
22. Siapa yang paling mendominasi atau paling berwenang dalam penetapan nomor urut Caleg partai Golkar DPRD: Ketua DPD, Tim khusus Dll
23. Apa yang paling menentukan caleg partai Golkar bisa duduk di nomor urut tertentu: Dekat dengan pengurus, keluarga, pengaruh sosial dan basis massa, kekuatan financial, loyalitas pada partai Dll.
24. Berapa dana yang harus disetorkan caleg partai Golkar ke partai sebagai wakaf
25. Apakah setiap nomor urut berbeda dana yang disetor ke partai
26. Apakah nomor urut memiliki mitos tertentu

27. Apakah ada caleg partai Golkar yang minta ditempatkan dinomor tertentu
28. Bagaimana DPD Golkar mengatasi gejolak ketidakpuasan caleg partai Golkar dalam penetapan nomor urut
29. Bagaimana mengatasi kekecewaan kader Golkar yang tidak lolos menjadi caleg resmi DPD Golkar
30. Apakah ada diantara kader-kader Golkar yang kecewa dengan penetapan caleg resmi kemudian pindah ke partai lain dengan alasan tidak puas
31. Apa kompensasi DPD Golkar terhadap kader yang tidak dalam daftar caleg resmi partai
32. Bagaimana pengaruh sosial dalam penetapan caleg partai Golkar: Diprioritaskan atau tidak (Keluarga lingkungan keraton, keluarga trah ulama, keluarga pejuang veteran, keluarga elit di jogja yang menguasai sumber-sumber ekonomi, Dll)

DAFTAR PERTANYAAN KPU Kota Yogyakarta

(Narasumber: Nashrullah, SH, S. Ag, MCL dan Aan Kurniasih, SH)

1. Bagaimana proses pileg di kota Yogyakarta 2009
2. Apa kendala yang dihadapi KPUD kota Yogyakarta pileg 2009
3. Berapa Dapil yang diperebutkan partai
4. Berapa caleg yang diajukan partai dan berapa yang lolos verifikasi sebagai caleg tetap tiap partai
5. Berapa partai yang tidak lolos *electoral threshold*
6. Bagaimana peta kekuatan partai Islam dan partai nasionalis pileg 2009
7. Berapa caleg jadi yang tidak memenuhi BPP dan Berapa caleg jadi yang memenuhi BPP
8. Berapa komposisi muka baru dan muka lama di DPRD kota Yogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN DPRD

Sekretariat DPRD kota Yogyakarta

1. Berapa komisi dan fraksi di DPRD kota Yogyakarta 2004 dan 2009
2. Bagaimana peran komisi dan fraksi dalam pembangunan di kota Yogyakarta
3. Bagaimana fraksi menjembatani kedekatan dengan konstituen
4. Bagaimana peta kekuatan partai politik lama dan partai politik baru 2004 dan 2009
5. Berapa komposisi muka baru dan muka lama di DPRD kota Yogyakarta
6. Bagaimana rekrutmen caleg partai-partai peserta pemilu
7. Bagaimana perimbangan legislator laki-laki dan perempuan
8. Bagaimana kursus-kursus yang diikuti anggota DPRD dan darimana biaya kursus tersebut

DAFTAR PERTANYAAN AKADEMISI

Nanang Indra Kurniawan, S. IP, MA

(Fisipol Universitas Gadjah Mada)

1. Bagaimana peta kekuatan politik di DPRD kota Yogyakarta 2004 dan 2009 (partai politik nasionalis dan partai yang berlandaskan agama)
2. Bagaimana mekanisme rekrutmen partai-partai politik dalam pemilu legislatif di kota Yogyakarta 2009
3. Mengapa terjadi Golput di kota Yogyakarta
4. Bagaimana pendapat bapak dengan kualitas caleg yang diajukan partai-partai politik untuk DPRD kota, terutama caleg DPD PKS dan DPD Golkar
5. Apa kekurangan rekrutmen caleg DPD PKS dan DPD Golkar secara khusus dan umumnya rekrutmen caleg partai-partai peserta pemilu legislatif di kota Yogyakarta
6. Bagaimana prediksi bapak tentang rekrutmen caleg pada pemilu legislatif 2014

NARASUMBER

No	Narasumber	Institusi	Jabatan
1	Muhammad Rosyidi, ST. MT	PKS	Ketua Umum DPD PKS
2	Bambang Anjar Jalumurti, S.Pi	PKS	Sekretaris DPD PKS dan ketua Tim PANJATIDA DPD PKS
3	Muhammad Yuniardi, SP	PKS	Ketua Bidang Pembinaan Kader
4	Drs. Suhartono, ST	Golkar	Ketua DPD Golkar dan ketua Tim 7
5	Bambang Seno Baskoro, ST	Golkar	Wakil ketua DPD Golkar
6	Augusnur, SH, S.IP	Golkar	Sekretaris DPD Golkar
7	Nasrullah, SH, S.Ag, MCL	KPU	Ketua KPU kota
8	Aan Kurniasih, SH	KPU	Anggota KPU dan ketua Tim Verifikasi daftar pemilih
10		Sekretraiat DPRD	Staff Sekretraiat DPRD
11	Nanang Indra Kurniawan, S.IP, MA	Fisipol UGM	Dosen Ilmu Politik UGM

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama: Muhammad Azani

Tempat dan Tanggal lahir: Bengkalis, 06 November 1981

Nama Orang Tua: katimon dan Siti Rofi'ah

Amalat: Jl. Dr. Soetomo, Bengkalis Riau

Pendidikan:

SDN Bengkalis Riau

MTs Swasta Ar-Rasyidin, Bengkalis Riau Lulus Tahun 1997

MA Yayasan Ali Maksum lulus Tahun 2000

Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan kalijaga Lulus Tahun 2006

Program Paska Sarjana Hukum Islam UIN Sunan kalijaga Lulus Tahun 2010

Pekerjaan:

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam, Bengkalis, Riau 2008-Sekarang

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar, Pekanbaru, Riau 2009-Sekarang